

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muktie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Abhan, dkk, 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu, Bawaslu , Jakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 263.
- Daniel S. Salossa, 2005, Mekanisme, Persyaratan, dan tatacara Pilkada Langsung menurut Undang-Undang Nomor 32 Th.2004, Media Pressindo, Yogyakarta.
- J. Kaloh,2010, Kepemimpinan Kepala Daerah, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janedjri M. Gaffar, 2010, Hukum Acara Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jakarta.
- Jimly Ashiediqy, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet,1*, Konstitusi Press, Jakarta.
- ,2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 1*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Joko. J Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta,

- Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmat Bagja, dkk 2019, Seri Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2011, Meningkatnya Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2018, Filsafat Pemilu, Nusa Media Bandung.
- Telly Sumbu, dkk, 2010, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Tim Peneliti Perludem, 2006, Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu Perludem, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta.
- Topo santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Firdaus, 2014, penyelesaian sengketa pemilu sebagai Upaya memulihkan kepercayaan dan Memperkuat legitimasi pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.2, April-Juni 2014
- Hamdan Zoelva, 2013, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal, Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013
- Helmi Kasim, 2012, Kompabilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi* Vol 9, No 4, Desember 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Herdi Munte dkk, 2017, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1.

Tanto Lailam & Putri Anggia, 2020, Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No.2 - Juni 2020.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4316.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organtsasi, dan tata Kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, Sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan Sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/ kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 826

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata beracara dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan gubernur Bupati, dan walikota Dan Tahapan, kegiatan, dan jadwal, Penanganan perkara perselisihan Hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota